

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat mobilitas yang tinggi di kota padat penduduk seperti DKI Jakarta mengharuskan masyarakat memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengingat bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat DKI Jakarta tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan transportasi guna menunjang fleksibilitas kegiatan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya ketersediaan transportasi umum yang menjadi sarana penghubung masyarakat dengan lokasi kegiatan sehari – hari. Bagi masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah penggunaan transportasi umum dapat dijadikan alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari mengingat transportasi umum di DKI Jakarta sudah terintegrasi ke setiap daerah di DKI Jakarta. Pemerintah sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat DKI Jakarta untuk mulai menggunakan transportasi umum guna mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan raya. Salah satu program yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum adalah dengan mengatur batas tarif bawah dan tarif atas selama transportasi umum beroperasi. Selain bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, peraturan tersebut dibuat untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat untuk turut serta menggunakan transportasi umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pelaksanaan kegiatan operasional transportasi umum diatur dengan memperhatikan asas-asas lalu lintas dimana pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Bab II Pasal 2 disebutkan asas-asas penting dalam melaksanakan kegiatan operasional transportasi umum diantaranya: transparansi; akuntabel; berkelanjutan; partisipatif; bermanfaat; efektif dan efisien; seimbang; terpadu, dan mandiri. Berdasarkan peraturan tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional transportasi umum harus mengandung asas efisien dan efektif. Efisien dan efektif dalam hal ini adalah pengertian bahwa

ketersediaan moda transportasi umum harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi penggunaannya, mengingat bahwa masyarakat ibukota memiliki mobilitas yang tinggi sehingga membutuhkan transportasi yang efektif dan efisien.

PT Transportasi Jakarta sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi umum berbasis *Bus Rapid Transit* (BRT) di DKI Jakarta menjadi moda transportasi andalan masyarakat DKI Jakarta sejak awal pendiriannya pada tahun 2004. Dengan mengadopsi sistem *Bus Rapid Transit* (BRT) yang sebelumnya sukses diterapkan pada sistem transportasi di Kolombia, Transjakarta sukses menerapkan sistem tersebut dan merupakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dengan jalur lintasan sepanjang 208 km. Fakta bahwa Transjakarta menjadi moda transportasi dengan lintasan terpanjang di dunia menunjukkan bahwa Transjakarta mampu menjangkau seluruh kawasan di DKI Jakarta dan terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya. Hal tersebut menjadikan Transjakarta menjadi moda transportasi andalan masyarakat DKI Jakarta karena dianggap mempermudah masyarakat dalam memobilisasi kegiatan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan operasional transjakarta tidak terlepas dari peran pemerintah provinsi DKI Jakarta yang turut mendukung program penggunaan transportasi umum dengan diberikannya *Public service obligation* (PSO) yang biasa disebut dengan subsidi kepada transjakarta sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam pemberdayaan transportasi umum di DKI Jakarta.

Pemberian subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada transjakarta merupakan suatu hal yang sangat positif mengingat PT Transportasi Jakarta merupakan badan usaha yang dominan digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta sebagai transportasi umum andalan. Pemberian subsidi tentunya akan berpengaruh terhadap perhitungan komponen biaya perjalanan di PT Transportasi Jakarta, dimana dengan adanya subsidi maka masyarakat dapat menikmati layanan transjakarta dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya pemberian subsidi dari pemerintah kepada transjakarta yang memberikan pengaruh terhadap harga tiket perjalanan transjakarta diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum transjakarta.

Guna meningkatkan minat masyarakat DKI Jakarta untuk menggunakan moda transportasi Transjakarta mengharuskan PT Transportasi Jakarta menyediakan fasilitas bus, sarana & prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) untuk melayani kebutuhan masyarakat. Proses peningkatan pelayanan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana tentunya memerlukan dana yang cukup besar mengingat transjakarta merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan transportasi umum bagi masyarakat DKI Jakarta. Dengan demikian maka pemberian subsidi dari pemerintah diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transjakarta kepada masyarakat sehingga peminat transportasi umum dapat meningkat khususnya transjakarta.

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada transjakarta tentunya melalui beberapa mekanisme dan tahapan hingga pada akhirnya disepakati adanya pemberian subsidi kepada PT Transportasi Jakarta. Pemberian subsidi pun dilakukan secara berkala yang disesuaikan dengan perhitungan biaya produksi transjakarta setiap periode. PT Transportasi Jakarta selaku penerima dana subsidi dari pemerintah juga harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi untuk kegiatan operasional transjakarta sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran, efektif, serta efisien.

Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah sebuah standar yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberikan batasan standar tertentu dalam pelayanan angkutan umum yang akan diterima oleh para penumpang. Jika PT Transportasi Jakarta mampu memenuhi seluruh komponen SPM yang telah ditentukan, maka subsidi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi diberikan secara penuh. Sebaliknya jika terdapat komponen SPM yang tidak dipenuhi oleh PT Transportasi Jakarta maka akan dikenakan denda dengan cara mengurangi nominal subsidi yang akan diberikan.

Ditinjau dari permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan mengenai pemberian subsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT

Transportasi Jakarta sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “ANALISIS PEMBERIAN *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* (PSO) PADA PT TRANSPORTASI JAKARTA PERIODE 2015 - 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang dibahas sebelumnya, dengan demikian pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah *Public Service Obligation* (PSO) pada PT Transportasi Jakarta?
- b. Bagaimana mekanisme pemberian *Public Service Obligation* (PSO) pada PT Transportasi Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dibuatnya penelitian ini antara lain:

- a. Maksud penelitian yang hendak diperoleh adalah melakukan analisis untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi *Public Service Obligation* (PSO) pada PT Transportasi Jakarta.
- b. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah mengetahui mekanisme pemberian *Public Service Obligation* (PSO) pada PT Transportasi Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai diantaranya:

- a. Manfaat secara teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *Public Service Obligation* (PSO) pada PT Transportasi Jakarta, sehingga dapat memberikan informasi yang valid dan reliabel yang berguna untuk kegiatan akademis di bidang Akuntansi.
 2. Manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian diharapkan bisa dimanfaatkan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya, terutama oleh mahasiswa perguruan tinggi yang akan melaksanakan penelitian pada disiplin ilmu Akuntansi.

b. Manfaat secara praktis

1. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai informasi tambahan yang mampu menentukan strategi yang tepat terkait kebijakan mengenai *Public Service Obligation* (PSO) dan masukan kepada pihak manajemen PT Transportasi Jakarta yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan.

2. Bagi peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan implementasi disiplin ilmu yang telah diperoleh pada ranah perkuliahan serta mampu meningkatkan pengalaman dan pengetahuan dalam menganalisis *Public Service Obligation* (PSO) PT transportasi Jakarta serta dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembuatan sistematika penulisan bermaksud untuk memaparkan pengertian dan pemahaman sebuah penelitian. Pada penelitian ini sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing bab memiliki uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat pendahuluan penelitian yang sebagian besar isinya menjelaskan gagasan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam bagian ini dijelaskan teori-teori secara terperinci yang mendukung proses penelitian yang akan dilakukan yang memuat tentang teori transportasi, pengertian pendapatan, serta konsep *Public service obligation* (PSO). Kajian literatur harus dielaborasi dengan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan/atau daerah penelitian yang memberikan gambaran

pengetahuan yang mendasari penelitian ini. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu kajian literatur, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berhubungan dengan penggunaan metodologi yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data perusahaan yang terdiri dari obyek/subyek penelitian, rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data. Metodologi yang disajikan berisi proses dan metode yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian penelitian ini akan dijabarkan terkait pengolahan data yang telah diperoleh selama periode pengumpulan data. Perhitungan akan dilakukan terhadap data yang diperoleh menggunakan data *Public service obligation (PSO)* sehingga didapatkan informasi yang valid dan relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengolahan data yang sudah dilaksanakan. Bab ini akan memaparkan kesimpulan mengenai faktor yang paling signifikan mempengaruhi jumlah pemberian *Public service obligation (PSO)*. Apakah mekanisme pemberian *Public service obligation (PSO)* telah efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga akan dipaparkan saran bagi perusahaan mengenai bagaimana membuat strategi dan kebijakan yang efektif terkait dengan *Public service obligation (PSO)*.